



Published every April, August and December

JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



Analisis Kointegrasi & Vector Error Correction Model Faktor Penentu Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat

Toni Heryana¹, Ikin Solikin², Indah Fitriani³

¹Program Studi Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

²Program Studi Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

³Program Studi Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Abstract. *Planning for local tax in Distric of West Bandung Barat still incremental and ignores the factors that influence it. This study aims to build a model for estimating local tax by using a cointegration regression model on regional expenditure, inflation, and gross regional domestic product on regional tax revenues during 2010 - 2015 in Distric of Bandung Barat. The results of the study show simultaneously and partially the regional expenditure variables, inflation, and gross regional domestic products have an influence on local tax revenues. The cointegration regression analysis also shows that there is a long-term balance between each variable of regional expenditure, inflation, and gross domestic product on tax revenues which means that changes in each independent variable to the dependent variable occur in a very long period. Cointegration regression can be used as a tool to estimate local tax revenues in the long run.*

Keywords: *Local Tax, Co-Integration, VECM Regional Expenditure, Inflation, PDRB*

Abstrak. Perencanaan pajak daerah pada Kabupaten Bandung Barat masih bersifat *incremental* dan mengabaikan faktor – faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan membangun model estimasi pajak daerah dengan menggunakan model regresi kointegrasi atas belanja daerah, inflasi, dan produk domestik regional bruto terhadap penerimaan pajak daerah selama tahun 2010 – 2015 di Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan dan parsial variabel belanja daerah, inflasi, dan produk domestik regional bruto memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Analisis regresi kointegrasi juga menunjukkan adanya keseimbangan jangka panjang antara masing – masing variabel belanja daerah, inflasi, dan produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak yang diartikan bahwa perubahan masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen terjadi dalam periode yang sangat lama. Regresi kointegrasi dapat digunakan sebagai alat untuk mengestimasi penerimaan pajak daerah dalam jangka panjang.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Kointegrasi, VECM, Belanja Daerah, Inflasi, PDRB

Corresponding author. toniheryana@upi.edu, ikin_solikin@yahoo.com, indah.fitriani@upi.edu

How to cite this article. Heryana, Toni, Solikin, Ikin dan Fitriani, Indah. (2018). Analisis Kointegrasi & Vector Error Correction Model Faktor Penentu Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 6 (3), 453-466. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4670>

History of article. Received: September 2018, Revision: November 2018, Published: December 2018

Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507.

Copyright©2018. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Keberhasilan desentralisasi pada suatu daerah diindikasikan dengan peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan di daerah yang bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dengan kata lain, dalam era desentralisasi ketergantungan terhadap dana - dana bantuan dari pemerintah pusat semestinya semakin berkurang dan pada bagian lain pelayanan publik di daerah semakin meningkat. Namun faktanya di Indonesia semenjak bergulirnya era desentralisasi pada tahun 1999 sampai hari ini sejumlah daerah masih menunjukkan tingkat kemandirian yang rendah (Alie, 2014). Menurut pakar, rendahnya tingkat kemandirian daerah dilihat dari PAD secara administrasi disebabkan oleh buruknya manajemen basis data dan informasi pajak daerah. Manajemen basis data ini memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan perencanaan dan pengawasan dalam bidang perpajakan. Dengan demikian bilamana manajemen basis data kondisinya memprihatinkan maka tentunya pemerintah daerah akan sangat kesulitan untuk melakukan perencanaan pendapatan pajak daerah.

Mengingat masih lemahnya basis data pajak daerah dan pada bagian lain terdesak oleh kondisi yang mengharuskan melakukan perencanaan penerimaan pajak daerah maka praktik yang terjadi di daerah saat ini adalah melakukan perencanaan penerimaan pajak daerah dengan metode incremental dan PAFPACK (*Program and Financial Planning Analysis Control-Koordinasi*) (Insitut Ilmu Pemerintahan dalam Aji, 2010). Dalam metode *incremental* penetapan target hanya didasarkan pada rata-rata perubahan tiap tahun jenis pendapatan yang diamati kemudian ditambah atau dikurangi dengan suatu persentase tertentu yang ditetapkan hanya secara intuitif. Sedangkan PAFPACK, penetapan target didasarkan pada metode *time series* dengan pola linier.

Kedua metode tersebut tentunya dinilai lemah dalam menaksir potensi penerimaan pajak yang sebenarnya, sebab kedua metode tersebut dalam proses perhitungannya mengabaikan faktor – faktor yang terkait

dengan volatilitas penerimaan pajak daerah itu sendiri. Bahkan seringkali penaksiran tersebut tanpa dijustifikasi oleh metode ilmiah tertentu, sehingga kondisi ini membuat perencanaan pajak menjadi sebuah kegiatan yang hanya sekedar memenuhi kegiatan perencanaan dalam rangka menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Hasilnya perencanaan yang telah disusun dan seyogianya menjadi standar dalam menilai kinerja pendapatan Pemerintah Daerah, tidak dapat dipergunakan dengan akurat.

Upaya untuk memformulasikan estimasi penerimaan pajak di beberapa negara telah banyak dilakukan para akademisi, diantaranya Beckett-Camarata (2006) yang melakukan kajian mengenai peramalan pada Kota Canton dan Kota Summit di Ohio Amerika Serikat. Dalam penelitiannya ia menemukan bahwa estimasi penerimaan pada kedua kota memiliki perbedaan tingkat keakurasian, dimana estimasi pajak yang dilakukan Kota Canton lebih akurat daripada Kota Summit. Perbedaan tersebut disebabkan oleh teknik yang berbeda, dimana Kota Canton dalam melakukan estimasinya didasarkan kepada penggunaan analisa *trend* dan beberapa jenis pajak menggunakan regresi sederhana sementara Kota Summit menggunakan pertimbangan dari pejabat keuangan Kota yang hanya didasarkan kepada pengalaman mereka selama menjabat.

Agak berbeda dengan penelitian sebelumnya, Kong (2007) meneliti pajak penjualan di California Amerika Serikat. Dalam penelitiannya ia menyusun estimasi penerimaan pajak penjualan dengan menggunakan ekstrapolasi dengan *moving average* dan analisis trend dengan rentang waktu 10 tahun dan kemudian membandingkannya dengan teknik perkiraan berdasarkan pengalaman. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa estimasi dengan menggunakan teknik statistik lebih akurat daripada berdasarkan teknik perkiraan yang selama ini dilakukan di California. Namun demikian dalam penelitiannya ia mengakui bahwa pendekatan statistik yang digunakannya terbatas pada estimasi yang didasarkan variabel pendapatan saja.

Di Indonesia penelitian mengenai estimasi pajak daerah juga dilakukan oleh Aji (2010) yang memfokuskan pada penentuan pajak dan retribusi parkir di Kabupaten Gresik. Hasil penelitiannya menjelaskan estimasi pajak dan retribusi parkir dapat menggunakan model *probabilistic* dalam bentuk *distributed lag* model dengan pendekatan *cointegration*. Melalui model *probabilistic*, ia memasukkan variabel makro ekonomi terpilih berupa variabel pengeluaran pemerintah dan suku bunga untuk memprediksi kendaraan roda dua dan roda empat. Berdasarkan variabel tersebut ia menjelaskan bahwa nilai estimasi yang diperoleh jauh lebih tinggi daripada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, sehingga ia menilai sebenarnya potensi parkir di Kabupaten Gresik dinilai tinggi dari nilai yang telah dicapai.

Yu et al. (2015) mengemukakan pandangannya mengenai pemilihan alat yang dipergunakan dalam mengestimasi pajak. Ia berpandangan bahwa estimasi yang didasarkan pada analisa time series seperti *moving average*, *exponential smoothing*, dan *autoregressive integrated moving average* dinilai kurang mampu menangkap berbagai perubahan dari faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, ia memberikan sebuah alternatif perhitungan estimasi dengan pendekatan *error correction* yang didasarkan pada data yang ditransformasikan.

Berdasarkan uraian berbagai teknik estimasi penerimaan daerah baik yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain, maka dalam penelitian ini ditawarkan alternatif model untuk mengatasi kelemahan teknik estimasi yang dipergunakan para peneliti sebelumnya yakni dengan menggunakan model regresi kointegrasi dan VECM. Berdasarkan teknik estimasi tersebut, dalam penelitian ini diformulasikan pemodelan estimasi penerimaan pajak di Kabupaten Bandung Barat dengan mempertimbangkan faktor belanja pemerintah kabupaten bandung barat dan kondisi makro ekonomi. Dengan demikian yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah mengembangkan model

estimasi pajak daerah Kabupaten Bandung Barat.

KAJIAN LITERATUR

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Falleti (2005) yang menjelaskan desentralisasi merupakan proses perubahan kewenangan yang diatur oleh serangkaian kebijakan pendistribusian tanggung jawab, sumber daya, atau kewenangan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Desentralisasi tidak hanya bicara tentang pelimpahan kewenangan dalam mengurus daerah, akan tetapi desentralisasi harus berorientasi pada tata kelola pemerintah yang baik dan kemandirian daerah, diantaranya kemandirian fiskal. Hal ini sebagaimana dikemukakan Shah (2005) yang menguraikan bahwa tujuan dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah menciptakan pemerintah daerah yang demokratis, transparan, meningkatkan kapasitas administrasi, dan lebih mandiri dan memiliki kemampuan dalam pengelolaan fiskal.

Pendistribusian kewenangan pengelolaan fiskal dalam teori *fiscal federalism* dinilai memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah pusat. Menurut teori ini proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan mempermudah penggunaan informasi yang efisien. Dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik daripada pemerintah pusat tentang kondisi daerah sehingga pemerintah daerah akan lebih baik dalam pengambilan keputusan tentang penyediaan barang dan jasa publik daripada jika diserahkan ke pemerintah pusat (Sasana, 2009).

Manfaat lain pendistribusian kewenangan pengelolaan fiskal kepada daerah

adalah mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang lebih baik karena penyerahan desentralisasi yang dilakukan akan memacu persaingan antar daerah untuk menciptakan situasi lingkungan ekonomi yang kondusif untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara mikro yang pada gilirannya berdampak pada peluang pertumbuhan penerimaan pajak daerah.

Situasi kondusif di daerah yang terbangun karena faktor persaingan, oleh Tiebout dalam Shah (2005) mengenalkan ungkapan “*love it or leave it*“. Tiebout menjelaskan masyarakat akan memilih untuk tinggal di lingkungan yang memenuhi preferensi yang paling tinggi antara pelayanan publik dari pemerintah daerahnya dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Ketika masyarakat tidak senang pada kebijakan pemerintah lokal dalam pembebanan pajak untuk pembiayaan barang publik di daerah, maka hanya ada dua pilihan bagi warga masyarakat, yaitu meninggalkan daerah tersebut atau tetap tinggal dengan berusaha mengubah kebijakan pemerintah daerah melalui perwakilannya di daerah (Hyman dalam Khusaini 2006).

Pentingnya desentralisasi fiskal juga didasarkan kepada perkembangan dari teori fiskal federalism yakni *new perspective theory* atau *second generation theory* yang menjelaskan desentralisasi akan mempengaruhi perilaku pemerintah daerah. Secara teoritik, idealnya pemerintah daerah akan berperilaku berbeda ketika pemerintah pusat menyerahkan berbagai kewenangan kepada pemerintah daerah, yaitu semakin berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di daerah.

Implikasi penting dari *new perspective theory* adalah bahwa desentralisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana hal tersebut sangat bergantung pada fiskal insentif yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan kedua teori yang melandasi desentralisasi fiskal dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal seyogyanya dapat mendekatkan pemerintah

kepada masyarakat, sehingga dalam sistem pemerintahan yang desentralistik akan menciptakan efisiensi dalam perekonomian, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Ross 1992 dalam Khusaini 2006).

Belanja Daerah dan Pajak Daerah

Teori *fiscal federalism* pada generasi pertama maupun kedua dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menjalankan tata kelola pemerintahan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Bahkan secara empiris hal tersebut sudah dinyatakan dalam berbagai peraturan di Indonesia sebagai salah satu kinerja yang harus dicapai oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Belanja daerah sebagai faktor input dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki peranan penting dalam menunjang terjadinya situasi yang kondusif dalam meningkatkan kapasitas fiskal suatu daerah. Ebel & Yilmaz (2002) menjelaskan kapasitas fiskal suatu negara adalah kapasitas pendapatan negara bagian relatif terhadap kebutuhan pengeluarannya. Suatu negara bagian dengan kapasitas fiskal yang rendah memiliki basis penerimaan yang relatif kecil, atau kebutuhan pengeluaran yang tinggi, atau kombinasi dari keduanya. Namun demikian, kapasitas fiskal yang rendah tidak selamanya mengimplikasikan posisi fiskal yang lemah. Negara bagian dengan kapasitas fiskal yang rendah dapat menjaga kesehatan fiskalnya, yaitu dengan mengatur agar penerimaan sama dengan pengeluaran. Negara yang bersangkutan dapat mengupayakan penerimaan yang tinggi, pengeluaran aktual yang rendah, atau melalui transfer dari pemerintah federal.

Negara-negara bagian dengan kapasitas fiskal yang rendah pada umumnya kurang mampu menghadapi guncangan ekonomi, sebagaimana dicontohkan pada kasus Badai Katrina yang melanda Louisiana, Mississippi, dan Alabama. Perbedaan kapasitas fiskal antar negara bagian menunjukkan adanya disparitas fiskal di dalam negara. Kesenjangan kapasitas fiskal, atau perbedaan di antara kapasitas

penerimaan dan kebutuhan pengeluaran, mengukur seberapa banyak upaya penerimaan yang dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan pengeluaran dari negara bagian tertentu. Kesenjangan ini dapat dikurangi melalui transfer dari pemerintah federal atau dengan melakukan pinjaman.

Kapasitas fiskal di daerah yang digambarkan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, menurut *The Tennessee Advisory Commission on Intergovernmental Relations* (TACIR). Menurut lembaga ini, kapasitas fiskal adalah ukuran kemampuan potensial pemerintah tertentu untuk menghasilkan pendapatan dari sumbernya sendiri relatif terhadap pemerintah lain yang sejenis. Lebih lanjut TACIR menjelaskan bahwa dalam menaksir kemampuan fiskal harus mencerminkan penyesuaian terhadap variabel belanja yang harus dikeluarkan pemerintah. Kuncoro (2007) menyebutkan belanja pemerintah mencerminkan kebutuhan fiskal yang harus dipenuhi.

Penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) menemukan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Cina mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu Wong (2004) menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. Dengan demikian sudah tersirat bahwa belanja daerah pada tahun sebelumnya akan menentukan besaran pajak daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan argumentasi konseptual di atas, dapat dikembangkan hipotesis:

H_1 : Belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.

Pertumbuhan Ekonomi dan Pajak Daerah

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Parameter kondisi ekonomi yang biasanya menjadi acuan kepentingan perusahaan adalah tingkat inflasi dan produk domestik regional bruto (PDRB).

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya (Bank Indonesia, 2018). Jika berbicara tentang inflasi, maka yang diperhatikan bukanlah perubahan harga-harga dari berbagai barang, akan tetapi perubahan rata-rata yang berlaku. Dimana besarnya nilai atau tingkat inflasi menggambarkan, dalam satu periode tertentu (tahunan, bulanan) secara rata-rata kenaikan harga-harga dalam perekonomian (Sukirno, 2016). Semakin tinggi inflasi secara rata-rata kenaikan harga barang-barang semakin tinggi, dan kondisi seperti ini akan menurunkan kegiatan investasi dan produksi dan berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak daerah.

Putri (2013) menemukan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak reklame. Hal ini menunjukkan bahwa jika laju inflasi semakin tinggi, maka harga secara umum juga akan naik, yang dalam hal ini juga akan meningkatkan harga-harga dari faktor produksi yang digunakan para pelaku usaha. Para pelaku usaha akan berusaha untuk memenuhi keperluan untuk proses produksinya terlebih dahulu, daripada menggunakan jasa reklame untuk mempromosikan hasil produksinya, maka dari itu inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak reklame.

Pertumbuhan ekonomi juga bisa ditinjau dari aspek PDRB. PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pertumbuhan PDRB seringkali menjadi acuan semua pelaku ekonomi untuk melakukan rencana peningkatan kapasitas produksi atau pelayanannya. Dalam situasi pertumbuhan ekonomi membaik boleh jadi pelaku ekonomi akan meningkatkan kapasitasnya. Peningkatan

kapasitas ini nantinya diharapkan pada pertumbuhan pendapatan.

Santosa & Rahayu, (2005) menemukan PDRB Kabupaten Kediri berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah. Begitu juga pada Kabupaten dan Kota se-Jawa dan Bali bahwa pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan PDRB memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan PAD. Dengan kata lain peningkatan PAD sebenarnya merupakan eksekusi dari pertumbuhan ekonomi (Adi, 2006)

Berdasarkan argumentasi konseptual di atas, dapat dikembangkan hipotesis:

H₂ : Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.

H₃ : Produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis kointegrasi multivariat. Juanda & Junaidi (2012, p. 124) menjelaskan kointegrasi multivariate harus memenuhi kriteria konsistensi dan mekanistik. Konsistensi dimaksudkan apakah hubungan antar variabel yang dibangun berlaku pada kondisi yang lain. Sedangkan mekanistik berkaitan dengan proses penentuan model yang menggambarkan proses hubungan sebab akibat. Sejalan dengan pendapat tersebut, model untuk mengestimasi penerimaan pajak daerah berdasarkan pengembangan konseptual yang telah dirancang sebelumnya, dituliskan sebagai berikut:

$$PD_t = \beta_0 + \beta_1 BEL_{t-1} + \beta_2 INF_{t-1} + \beta_3 PDRB_{t-1} + \varepsilon_t$$

Dimana:

- PD_t = Penerimaan pajak daerah tahun t.
BEL_{t-1} = Belanja daerah tahun sebelumnya.
INF_{t-1} = Inflasi daerah tahun sebelumnya.
PDRB_{t-1} = PDRB tahun sebelumnya.
ε_t = error term pada tahun t.

Jika ε_t stasioner, maka model regresi variabel dependen terhadap variabel independen adalah terkointegrasi (Juanda & Junaidi, 2012, p. 125). Kointegrasi dapat diartikan pergerakan variabel dependen terhadap variabel

independen memiliki pola panjang gelombang yang sama. Dengan kata lain perubahan jangka panjang dari variabel independen akan berdampak sama terhadap perubahan jangka panjang pada variabel dependen.

Perbedaan lain regresi yang didasarkan pada uji kointegrasi dengan regresi tanpa uji kointegrasi adalah adanya pengujian stasioneritas pada variabel yang akan dianalisis. Pengujian stasioneritas dalam penelitian ini menggunakan instrumen uji akar unit (*unit root test*) berupa uji *Dickey – Fuller* (DF test) dengan teknik pengujian sebagai berikut:

$$\tau = \frac{\hat{\rho}}{Se(\hat{\rho})}$$

Dimana:

τ = Distribusi statistik τ McKinnon

Se = Standard error

ρ = Nilai korelasi antar variabel

Hipotesis yang digunakan adalah:

H₀ : δ = 0 (yang berarti PD_t, tidak stasioner)

H₁ : δ < 0 (yang berarti PD_t, stasioner)

Jenis data yang diolah dalam penelitian berupa data sekunder yang bersumber dari Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat maupun Kabupaten Bandung Barat dalam Angka setiap bulan dalam kurun waktu 2010 – 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan terkointegrasi tidaknya model yang akan dianalisis, ditentukan berdasarkan pengujian stasioneritas data dengan menggunakan uji DF. Lampiran 1 menunjukkan nilai probabilitas *Dickey-Fuller* kurang dari 5% yang berarti seluruh data pada masing – masing variabel yang diteliti dinyatakan *stationer* pada level 1%, 5% maupun 10%. Dengan demikian berdasarkan pengujian stasioneritas data dapat disimpulkan antara variabel belanja daerah, inflasi, dan PDRB terkointegrasi.

Luaran hasil perhitungan regresi terkointegrasi berdasarkan perhitungan *e-views* 9 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Perhitungan Regresi Pajak Daerah

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.	R-Squared
C	-3.714027	0.258111	-14.38924	0.0000 ^a	0.8640
BEL	-0.023820	0.003114	-7.649932	0.0000 ^a	
INF	-0.090385	0.006170	-14.64802	0.0000 ^a	
PDRB	0.157874	0.008994	17.55369	0.0000 ^a	

^a Signifikan pada $\alpha = 1\%$

Sumber: Hasil perhitungan e-views versi 9, 2018

Tabel 1 menginformasikan bahwa pajak daerah dapat dijelaskan dengan variabel belanja, inflasi, dan produk domestik regional bruto. Determinasi sebesar 86,40% diartikan bahwa ketiga variabel yang diteliti memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap penerimaan pajak daerah. Dengan kata lain ketiga variabel independen yang diteliti merupakan variabel yang dominan dalam menjelaskan perubahan penerimaan pajak daerah. Hal ini juga didukung oleh pengaruh yang signifikan ketiga variabel independen terhadap variabel dependen dengan *alpha* 1%.

Secara parsial, belanja daerah memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah. Ini berarti belanja daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama 2010 – 2015 justru menggerus penerimaan pajak di tahun mendatang sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk belanja daerah. Dengan kata lain kondisi ini mencerminkan belanja daerah yang dilakukan dinilai tidak efektif sebagai faktor untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.

Temuan ini sejalan dengan teori Peacock dan Wiseman yang menjelaskan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut yang pada gilirannya pemungutan pajak yang semakin meningkat dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran

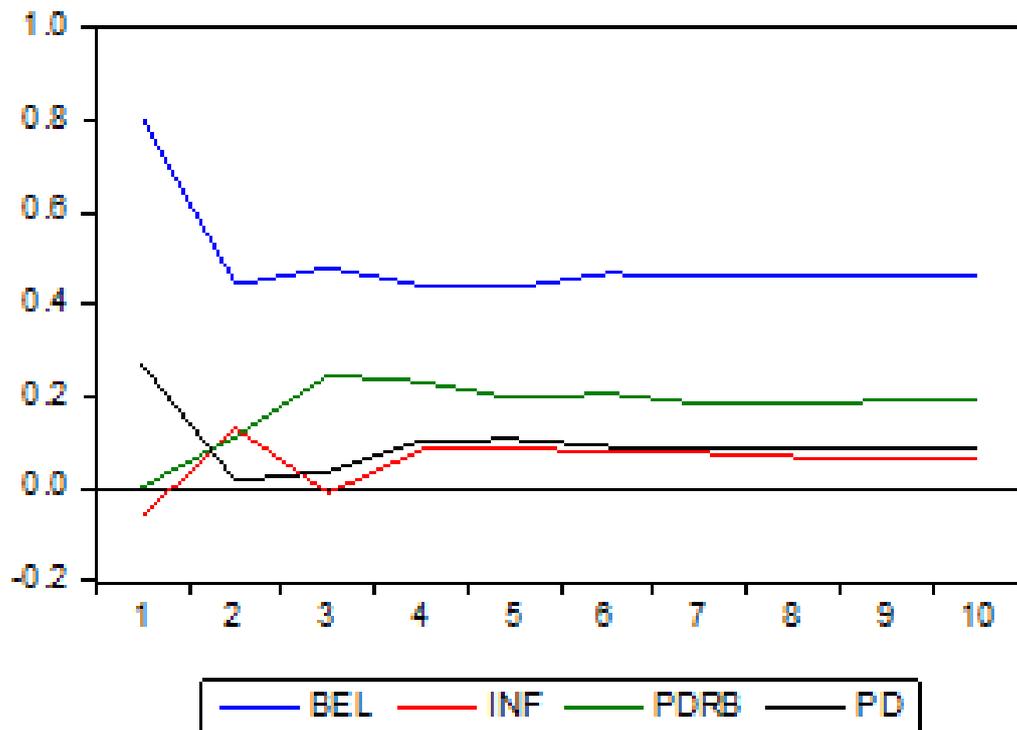
pemerintah juga semakin meningkat (Santosa & Rahayu, 2005).

Inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah. Temuan ini memperkuat kondisi ideal inflasi pada suatu daerah yang relatif rendah dan dapat dikendalikan dengan baik menjadi faktor yang menentukan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik tentunya akan berdampak pada penerimaan pajak daerah. Begitu pula dengan PDRB sebagai cerminan pertumbuhan ekonomi. Idealnya PDRB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. PDRB yang semakin membaik berdampak terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang memperlihatkan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Temuan yang menjelaskan adanya hubungan kointegrasi antara variabel independe terhadap dependen, juga dibuktikan melalui grafik *impulse respon*. Gambar 1 menunjukkan belanja daerah memiliki pola pergerakan yang sama dengan pajak daerah. Hal ini semakin memperkuat bukti empiris bahwa efektivitas belanja daerah berimplikasi terhadap pajak daerah. Begitu juga inflasi dengan pajak daerah yang menunjukkan peningkatan inflasi dalam beberapa periode berbanding terbalik dengan pajak daerah. Sementara PDRB berbanding lurus dengan pajak daerah. Secara umum *impulse respon* semua variabel berada di atas titik keseimbangan (di atas nol) hal ini menunjukkan perubahan akibat variabel ketiga

variabel independen terhadap variabel dependen dirasakan pada waktu rentang waktu 10 bulan mendatang di tahun 2016. Diperkirakan perubahan dampak ketiga

variabel independen juga akan berpola sama berada di atas titik keseimbangan.



Sumber : Hasil perhitungan e-views versi 9, 2018

Gambar 1. Impulse Respons Variabel Penelitian.

Persamaan regresi kointegrasi pajak daerah tahun t berdasarkan variabel belanja daerah, inflasi, PDRB, dan pajak daerah tahun sebelumnya ($t-1$) dituliskan sebagai berikut:

$$PD_t = -52.22 - 0.55 \cdot BEL_{t-1} - 3.40 \cdot INF_{t-1} + 1.39 \cdot PDRB_{t-1} + 1.00 \cdot PD_{t-1}$$

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan secara simultan dan parsial variabel belanja daerah, inflasi, dan produk domestik regional bruto memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Bahkan koefisien determinasi menunjukkan pengaruh variabel belanja daerah, inflasi, dan produk domestik regional bruto menunjukkan pengaruh yang sangat kuat. Ini berarti ketiga variabel tersebut sangat menentukan perubahan penerimaan pajak daerah.

Analisis regresi kointegrasi juga menunjukkan adanya keseimbangan jangka

panjang antara masing – masing variabel belanja daerah, inflasi, dan produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak yang diartikan bahwa perubahan masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen terjadi dalam periode yang sangat lama.

Temuan penelitian yang mengungkapkan adanya pengaruh negatif belanja daerah terhadap penerimaan pajak daerah, menunjukkan perlunya pengendalian belanja daerah oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai faktor input dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah mendanai penelitian Hibah

Bersaing tahun anggaran 2016. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) Universitas Pendidikan Indonesia yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian Hibah Bersaing.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, T.S., 2010. Model Alternatif untuk Membangun Sistem Informasi Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11, pp.160–171.
- Alie, M., 2014. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah. <http://marzukialie.com>, (32), pp.1–2.
- Adi, P. H. (2006). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah : Studi pada Kabupaten dan Kota se-Jawa Bali. In *Simposium Nasional Akuntansi IX* (pp. 23–26).
- Beckett-Camarata, J. (2006). Revenue Forecasting Accuracy in Ohio Local Governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 18(1), 77–99.
- Ebel, R. D., & Yilmaz, S. (2002). *Concept of Fiscal Decentralization and Worldwide Overview*. New York, United State of America: World Bank Institute.
- Falleti, T. G. (2005). A Sequential Theory of Decentralization : Latin American Cases in Comparative Perspective. *American Political Science Review*, 99, 327 – 346.
- Juanda, B., & Junaidi. (2012). *Ekonometrika Deret Waktu : Teori dan Aplikasi*. Bogor, Indonesia: IPB Press.
- Khusaini, M. (2006). *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPF Universitas Brawijaya.
- Kong, D. (2007). Local Government Revenue Forecasting: The California County Experience. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(2), 178–199.
- Kuncoro, H. (2007). Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. In *Simposium Nasional Akuntansi X* (pp. 1–29). Makassar, Indonesia.
- Lin, J. Y., & Liu, Z. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change*, 49, 1–21.
- Putri, P. I. (2013). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. *Journal of Economics and Policy*, 6(2), 103–213.
- Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor - Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. *Dinamika Pembangunan*, 2(1), 9–18.
- Sasana, H. (2009). Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 103–124.
- Shah, A. (2005). Fiscal Decentralization and Fiscal Performance. In *Annual Congress of the International Institute of Public Finance*. Jeju Island, Korea.
- Sukirno, S. (2016). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta, Indonesia: Jasakom.
- Yu, Z., Yang, C., Zhang, Z., & Jiao, J. (2015). Error Correction Method Based on Data Transformational GM (1,1) and Application on Tax Forecasting. *Applied Soft Computing Journal*, 37, 554–560.
- Falleti, T.G., 2005. A Sequential Theory of Decentralization : Latin American Cases in Comparative Perspective. *American Political Science Review*, 99, pp.327 – 346.
- Juanda, B. & Junaidi, 2012. *Ekonometrika Deret Waktu : Teori dan Aplikasi*, Bogor, Indonesia: IPB Press.

- Khusaini, M., 2006. *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang: BPFE Universitas Brawijaya.
- Kong, D., 2007. Local Government Revenue Forecasting: The California County Experience. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(2), pp.178–199.
- Muharam, H., 2013. *Modul Kuliah Aplikasi Ekonometri*, Semarang, Indonesia: Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB UNDIP.
- Sasana, H., 2009. Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
- Shah, A., 2005. Fiscal Decentralization and Fiscal Performance. In *Annual Congress of the International Institute of Public Finance*. Jeju Island, Korea.
- Suparmoko, 2010. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Yu, Z. et al., 2015. Error Correction Method Based on Data Transformational GM (1,1) and Application on Tax Forecasting. *Applied Soft Computing Journal*, 37, pp.554–560.

Lampiran 1 – Hasil Pengujian Stationeritas Data

Variabel Belanja Pemerintah Daerah (BEL)

Null Hypothesis: BEL has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.962824	0.0028
Test critical values:		
1% level	-3.531592	
5% level	-2.905519	
10% level	-2.590262	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Variabel Inflasi (INF)

Null Hypothesis: INF has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.350657	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.527045	
5% level	-2.903566	
10% level	-2.589227	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Null Hypothesis: PDRB has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-5.233978	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.525618	
5% level	-2.902953	
10% level	-2.588902	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Variabel Pajak Daerah (PD)

Null Hypothesis: PD has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 11 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.900488	0.0036
Test critical values:		
1% level	-3.544063	
5% level	-2.910860	
10% level	-2.593090	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Lampiran 2 – Pengujian Regresi Kointegrasi

Date: 01/08/19 Time: 10:29
 Sample (adjusted): 2010M04 2015M12
 Included observations: 69 after adjustments
 Trend assumption: Linear deterministic trend
 Series: BEL INF PDRB PD
 Lags interval (in first differences): 1 to 2
 Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.416438	70.57931	47.85613	0.0001
At most 1 *	0.247478	33.41565	29.79707	0.0183
At most 2	0.129984	13.79722	15.49471	0.0887
At most 3 *	0.058910	4.189430	3.841466	0.0407

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Vector Error Correction Estimates

Date: 01/10/19 Time: 22:46

Sample (adjusted): 2010M04 2015M12

Included observations: 69 after adjustments

Standard errors in () & t-statistics in []

Cointegrating Eq:	CointEq1			
PD(-1)	1.000000			
BEL(-1)	-0.552146 (0.25526) [-2.16310]			
INF(-1)	-3.995712 (0.65478) [-6.10239]			
PDRB(-1)	1.394329 (1.13119) [1.23262]			
C	-52.21750			
Error Correction:	D(PD)	D(BEL)	D(INF)	D(PDRB)
CointEq1	-0.073993 (0.06696) [-1.10511]	-0.044263 (0.07274) [-0.60853]	0.248621 (0.04349) [5.71655]	-0.029999 (0.02471) [-1.21397]
D(PD(-1))	-0.134566 (0.14438) [-0.93202]	-0.217468 (0.15685) [-1.38647]	-0.123482 (0.09378) [-1.31665]	0.173860 (0.05329) [3.26268]
D(PD(-2))	-0.065269 (0.15016) [-0.43465]	-0.112897 (0.16313) [-0.69206]	-0.101993 (0.09754) [-1.04564]	0.037717 (0.05542) [0.68054]
D(BEL(-1))	-0.121445 (0.12458) [-0.97481]	-0.329711 (0.13534) [-2.43615]	0.166562 (0.08092) [2.05825]	-0.130837 (0.04598) [-2.84551]
D(BEL(-2))	-0.024152 (0.12884) [-0.18746]	-0.109470 (0.13997) [-0.78211]	0.068146 (0.08369) [0.81427]	-0.075182 (0.04755) [-1.58106]
D(INF(-1))	-0.422564 (0.19119) [-2.21020]	0.154045 (0.20770) [0.74167]	0.486510 (0.12419) [3.91751]	-0.050197 (0.07056) [-0.71138]
D(INF(-2))	-0.303117 (0.19669) [-1.54110]	-0.325967 (0.21367) [-1.52553]	0.071472 (0.12776) [0.55942]	0.028574 (0.07259) [0.39361]
D(PDRB(-1))	0.388670	0.100933	-0.220379	-0.469228

	(0.33119)	(0.35979)	(0.21513)	(0.12224)
	[1.17354]	[0.28053]	[-1.02440]	[-3.83874]
D(PDRB(-2))	0.080195	0.626852	0.232688	-0.280487
	(0.32740)	(0.35568)	(0.21267)	(0.12084)
	[0.24494]	[1.76242]	[1.09413]	[-2.32121]
C	0.063723	0.020963	0.033710	0.005447
	(0.09067)	(0.09850)	(0.05890)	(0.03346)
	[0.70279]	[0.21282]	[0.57235]	[0.16277]
R-squared	0.163700	0.253051	0.516364	0.307461
Adj. R-squared	0.036129	0.139110	0.442589	0.201819
Sum sq. resids	32.83713	38.75346	13.85496	4.472950
S.E. equation	0.746030	0.810456	0.484592	0.275341
F-statistic	1.283209	2.220888	6.999173	2.910415
Log likelihood	-72.28890	-78.00417	-42.51827	-3.512747
Akaike AIC	2.385185	2.550846	1.522269	0.391674
Schwarz SC	2.708969	2.874629	1.846052	0.715457
Mean dependent	0.048617	0.007173	0.030515	0.007409
S.D. dependent	0.759884	0.873485	0.649066	0.308191
Determinant resid covariance (dof adj.)		0.005367		
Determinant resid covariance		0.002869		
Log likelihood		-189.6720		
Akaike information criterion		6.773101		
Schwarz criterion		8.197749		

